

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET DAERAH TANAH DAN GEDUNG DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AGNESSA SHALSABILA RIZANI

Aset merupakan sumberdaya yang termasuk penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara konsisten dan efisien, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Penghapusan aset merupakan salah satu bagian dari bentuk pengelolaan aset/barang milik daerah selain dari fungsi manajemen lainnya seperti penganggaran, pengelolaan, pemanfaatan serta fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Terdapat hambatan signifikan seperti keterbatasan SDM dan anggaran, lemahnya koordinasi antar OPD, belum tersertifikasinya sebagian aset, serta sikap pelaksana yang kurang proaktif. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan peningkatan kapasitas SDM dan anggaran, penguatan koordinasi lintas OPD, dan percepatan sertifikasi aset tanah.

Kata Kunci : Penghapusan aset daerah BPKAD, pemerintah daerah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISMISSAL OF REGIONAL ASSETS OF LAND AND BUILDINGS IN THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

AGNESSA SHALSABILA RIZANI

Assets are important resources for local governments. By managing regional assets consistently and efficiently, local governments will obtain sources of funds to finance development in the region. Asset disposal is one part of the form of asset/property management of the region in addition to other management functions such as budgeting, management, utilization and planning and implementation functions. This study aims to analyze the implementation of asset deletion policies for land and buildings owned by the local government at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City. The analysis uses the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which includes six key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, external environment, and the disposition of implementers. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal. Major obstacles include limited human and financial resources, weak inter-agency coordination, uncertified assets, and passive attitudes of implementers. To address these challenges, it is recommended to improve HR capacity and budget allocation, strengthen inter-agency coordination, and accelerate the certification of land assets

Keywords: Assets Deletion BPKAD, Local Government.